

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang selesai pada tahun berjalan}} \times 100\%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Ketua PA	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dihadiri kedua pihak berperkara}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website 1 hari sejak diputus}}{\text{jumlah putusan perkara ekonomi syariah}} \times 100\%$	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang perlu mendapat bantuan hukum (posbakum)}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT yang mohon eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5	Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima	a. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah anggaran yang terealisasi tepat waktu}}{\text{jumlah pagu anggaran yang seharusnya direalisasi tepat waktu}} \times 100\%$ Catatan : Realisasi anggaran untuk tahun berjalan pada DIPA 01 dan DIPA 04	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal x 100 %	Ketua PA	Laporan Tindak lanjut Temuan
			Catatan : Temuan eksternal adalah temuan dari pihak luar Pengadilan Agama Negara		



Ketua Pengadilan Agama Negara

Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP. 198005312003121003

Sekretaris

Akhmad Muzakkir, S.H.I.
NIP. 198011172007041001

Negara, 2 Januari 2025
Panitera

Winda Herliana, S.H.
NIP. 198606012009042010